



Tinjauan Kritis terhadap Asumsi dan Prosedur dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Zaenur Rahman¹, Mohamad Djasuli²

^{1,2} Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Received: 3 Oktober 2024
Revised: 13 Oktober 2024
Accepted: 30 Oktober 2024

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan proses penting dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Studi ini melakukan tinjauan kritis terhadap asumsi dan prosedur yang digunakan dalam penyusunan APBD. Berbagai asumsi ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan target pendapatan daerah, menjadi dasar dalam menyusun anggaran. Namun, sering kali asumsi tersebut menghadapi tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini mencermati pula prosedur yang digunakan dalam penyusunan APBD, termasuk partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas. Tantangan dalam proses ini antara lain berkaitan dengan kompleksitas peraturan dan kurangnya keterlibatan masyarakat secara langsung. Dengan menggunakan pendekatan kritis, studi ini menyoroti kebutuhan akan perbaikan dalam asumsi yang digunakan dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan APBD. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta untuk memastikan bahwa APBD mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih akurat. Penelitian lebih lanjut dapat fokus pada analisis dampak dari asumsi dan prosedur yang digunakan terhadap hasil APBD serta strategi perbaikan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Asumsi ekonomi, Prosedur penyusunan, Partisipasi publik, Transparansi dan akuntabilitas

(*) Corresponding Author: ¹zaenurr103@gmail.com, ²djasuli@trunojoyo.ac.id

How to Cite: Rahman, Z., & Djasuli, M. (2024). Tinjauan Kritis terhadap Asumsi dan Prosedur dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 889-895. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9159>

PENDAHULUAN

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu aspek kunci dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang memerlukan perhatian serius. Proses ini tidak hanya mencerminkan prioritas dan kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kinerja ekonomi dan keuangan daerah secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya, penyusunan APBD seringkali menghadapi tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan asumsi yang digunakan dan prosedur yang diterapkan.

Mardiasmo (2019) dalam bukunya "Perencanaan dan Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" menggarisbawahi pentingnya asumsi dalam proses penyusunan APBD. Asumsi tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan target pendapatan daerah menjadi fondasi bagi pembuatan anggaran yang akurat. Namun, sulitnya memprediksi variabel-variabel ekonomi ini seringkali menimbulkan ketidakpastian yang signifikan.

Evaluasi terhadap asumsi-asumsi ekonomi dalam penyusunan APBD menjadi penting untuk memastikan keakuratan anggaran yang dibuat. Penelitian oleh Sulistyowati & Nugroho (2018) mengenai "Evaluasi Asumsi-asumsi Ekonomi



dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang" menyoroti pentingnya mengkaji ulang asumsi-asumsi ekonomi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun APBD. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan realita ekonomi yang terjadi.

Selain asumsi, prosedur yang digunakan dalam penyusunan APBD juga memiliki peran yang krusial. Partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas menjadi prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam proses ini. Namun, dalam prakteknya, seringkali proses penyusunan APBD kurang memperhatikan hal tersebut.

Penelitian oleh Arief (2017) mengenai "Partisipasi Publik dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Studi Kasus di Kota Surakarta" menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam proses penyusunan APBD masih belum optimal. Kurangnya partisipasi ini dapat mengakibatkan APBD tidak mencerminkan sepenuhnya kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi isu yang penting dalam penyusunan APBD. Suharto & Cahyono (2016) dalam penelitiannya tentang "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang" menyoroti pentingnya pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan anggaran daerah kepada masyarakat.

Tinjauan kritis terhadap asumsi dan prosedur dalam penyusunan APBD menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Prastowo (2015) dalam penelitiannya mengenai "Kritis terhadap Asumsi Pertumbuhan Ekonomi dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Studi Kasus di Kabupaten Sleman" menyoroti perlunya pembaruan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menyusun APBD guna meningkatkan akurasi dan relevansi anggaran dengan keadaan ekonomi yang sebenarnya.

Selain itu, Wibowo & Kristanto (2014) dalam "Analisis Prosedur Penyusunan APBD Kabupaten Sleman" menekankan pentingnya memperbaiki prosedur-prosedur dalam penyusunan APBD untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Begitu juga dengan penelitian Santoso & Widodo (2013) tentang "Tinjauan Kritis terhadap Asumsi-asumsi Ekonomi dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul", yang menyoroti kebutuhan akan peningkatan transparansi dalam proses penyusunan APBD.

Partisipasi publik juga harus diperkuat dalam proses penyusunan APBD. Handayani & Widiyanto (2012) dalam penelitiannya tentang "Partisipasi Publik dalam Proses Penyusunan APBD Kabupaten Kulon Progo" menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran daerah dapat meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Demikian pula, Kristiawan & Putra (2011) dalam "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penyusunan APBD Kota Yogyakarta" menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan APBD untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Penelitian oleh Indriyani & Purnomo (2010) tentang "Evaluasi Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul" menunjukkan perlunya evaluasi terus-menerus terhadap prosedur-prosedur dalam penyusunan APBD untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, tinjauan kritis terhadap asumsi dan prosedur dalam penyusunan APBD menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran daerah.

METODE

Metode penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan hanya dengan studi pustaka merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam analisis kebijakan dan penelitian di bidang ilmu sosial. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara mendalam asumsi dan prosedur dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui tinjauan literatur yang tersedia.

Penelitian ini menggabungkan berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan publikasi pemerintah, untuk memahami secara komprehensif tentang asumsi dan prosedur dalam penyusunan APBD. Melalui analisis deskriptif kualitatif, berbagai teori, konsep, dan temuan dari penelitian sebelumnya digunakan untuk menyusun pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian ini.

Metode penelitian ini melibatkan langkah-langkah berikut:

Pertama, identifikasi dan pengumpulan literatur terkait dengan asumsi dan prosedur dalam penyusunan APBD. Langkah ini melibatkan pencarian terhadap buku, jurnal, dan publikasi terbaru yang relevan dengan topik penelitian.

Kedua, evaluasi dan analisis terhadap literatur yang terkumpul. Peneliti melakukan analisis kualitatif terhadap berbagai sumber literatur untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan yang relevan dengan asumsi dan prosedur dalam penyusunan APBD.

Ketiga, penyusunan sintesis dan interpretasi hasil analisis. Berdasarkan analisis terhadap literatur, peneliti menyusun sintesis yang menggambarkan asumsi-asumsi yang umum digunakan, prosedur-prosedur yang biasanya diterapkan, serta tantangan dan kritik yang muncul dalam penyusunan APBD.

Keempat, pembuatan kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan sintesis dan interpretasi hasil analisis, peneliti menarik kesimpulan mengenai kondisi penyusunan APBD serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan inovasi dalam proses tersebut.

Dengan demikian, metode penelitian kualitatif deskriptif hanya dari studi pustaka ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang asumsi dan prosedur dalam penyusunan APBD berdasarkan pada literatur yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Asumsi dan prosedur yang digunakan dalam penyusunan APBD memainkan peran kunci dalam menentukan kualitas dan keberhasilan anggaran tersebut. Dalam pembahasan ini, kita akan mengevaluasi tinjauan kritis terhadap asumsi dan prosedur dalam penyusunan APBD berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan.

Asumsi-asumsi ekonomi menjadi dasar penting dalam penyusunan APBD. Mardiasmo (2019) dalam bukunya "Perencanaan dan Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" menyoroti pentingnya asumsi-asumsi ini dalam menentukan proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Namun, evaluasi terhadap asumsi-asumsi ekonomi ini penting dilakukan secara berkala untuk memastikan keakuratan dan relevansinya dengan kondisi ekonomi aktual. Misalnya, penelitian oleh Sulistyowati & Nugroho (2018) mengenai "Evaluasi Asumsi-asumsi Ekonomi dalam Penyusunan APBD Kabupaten Magelang" menemukan bahwa asumsi-asumsi ekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBD seringkali optimis, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara proyeksi dan realitas ekonomi.

Selain asumsi ekonomi, partisipasi publik juga menjadi faktor penting dalam proses penyusunan APBD. Arief (2017) dalam penelitiannya tentang "Partisipasi Publik dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Surakarta" menemukan bahwa partisipasi publik masih belum optimal, sehingga menyebabkan kekurangan representasi kepentingan masyarakat dalam anggaran. Kurangnya partisipasi ini juga dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan APBD.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD juga menjadi fokus utama dalam kritik terhadap proses ini. Suharto & Cahyono (2016) dalam "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penyusunan APBD Kota Semarang" menyoroti pentingnya pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran daerah. Namun, penelitian oleh Kristiawan & Putra (2011) tentang "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penyusunan APBD Kota Yogyakarta" menunjukkan bahwa masih banyaknya kekurangan dalam transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan APBD.

Prosedur-prosedur yang digunakan dalam penyusunan APBD juga menjadi objek kritis dalam penelitian ini. Prastowo (2015) dalam "Kritis terhadap Asumsi Pertumbuhan Ekonomi dalam Penyusunan APBD: Studi Kasus di Kabupaten Sleman" menyoroti pentingnya evaluasi terhadap prosedur-prosedur yang digunakan dalam penyusunan APBD untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya. Begitu juga dengan penelitian Wibowo & Kristanto (2014) tentang "Analisis Prosedur Penyusunan APBD Kabupaten Sleman", yang menemukan beberapa kelemahan dalam prosedur-prosedur tersebut yang memengaruhi kualitas APBD.

Tinjauan kritis terhadap asumsi dan prosedur dalam penyusunan APBD sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas anggaran daerah. Melalui evaluasi yang mendalam terhadap asumsi ekonomi, partisipasi publik, transparansi, dan prosedur-prosedur yang digunakan, pemerintah daerah dapat

memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan memastikan bahwa APBD benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, penyusunan APBD dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat setempat. Namun, proses penyusunan APBD tidak selalu berjalan mulus dan sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan asumsi yang digunakan dan prosedur yang diterapkan. Dalam konteks ini, tinjauan kritis terhadap asumsi dan prosedur dalam penyusunan APBD menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran daerah.

Asumsi ekonomi menjadi salah satu komponen utama dalam penyusunan APBD. Asumsi-asumsi ini mencakup berbagai variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan target pendapatan daerah. Namun, asumsi-asumsi tersebut seringkali mengalami ketidakpastian karena dinamika ekonomi yang kompleks. Penelitian oleh Sulistyowati & Nugroho (2018) menunjukkan bahwa asumsi-asumsi ekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Magelang cenderung optimis, sehingga seringkali tidak sesuai dengan realitas ekonomi yang ada. Evaluasi terhadap asumsi-asumsi ekonomi ini menjadi penting untuk memastikan keakuratan proyeksi pendapatan dan belanja daerah serta menghindari ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dengan realita ekonomi yang terjadi.

Selain asumsi ekonomi, partisipasi publik juga menjadi faktor kunci dalam proses penyusunan APBD. Partisipasi publik yang baik dapat memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Namun, penelitian oleh Arief (2017) menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam proses penyusunan APBD di Kota Surakarta masih belum optimal. Kurangnya partisipasi ini dapat mengakibatkan anggaran tidak mencerminkan sepenuhnya kepentingan masyarakat serta berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan APBD.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi fokus utama dalam tinjauan kritis terhadap penyusunan APBD. Transparansi yang memadai dalam proses penyusunan APBD dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran secara lebih efektif. Namun, penelitian oleh Kristiawan & Putra (2011) menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan APBD Kota Yogyakarta. Kurangnya transparansi ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta memengaruhi legitimasi kebijakan yang diambil.

Prosedur-prosedur yang digunakan dalam penyusunan APBD juga menjadi objek kritis dalam penelitian ini. Evaluasi terhadap prosedur-prosedur ini penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan APBD. Wibowo & Kristanto (2014) menemukan beberapa kelemahan dalam prosedur-prosedur penyusunan APBD Kabupaten Sleman yang memengaruhi kualitas anggaran. Begitu juga dengan penelitian oleh Prastowo (2015) tentang "Kritis terhadap

Asumsi Pertumbuhan Ekonomi dalam Penyusunan APBD: Studi Kasus di Kabupaten Sleman", yang menyoroti pentingnya evaluasi terhadap prosedur-prosedur yang digunakan dalam penyusunan APBD untuk memastikan efektivitas dan relevansinya dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Tinjauan kritis terhadap asumsi dan prosedur dalam penyusunan APBD menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas anggaran daerah. Melalui evaluasi yang mendalam terhadap asumsi ekonomi, partisipasi publik, transparansi, dan prosedur-prosedur yang digunakan, pemerintah daerah dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan memastikan bahwa APBD benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, penyusunan APBD dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan hal yang kompleks dan krusial bagi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Dalam tinjauan kritis terhadap asumsi dan prosedur dalam penyusunan APBD, kita melihat bahwa asumsi ekonomi, partisipasi publik, transparansi, dan prosedur-prosedur yang digunakan memainkan peran penting dalam menentukan kualitas dan keberhasilan anggaran tersebut.

Pertama, asumsi ekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi aktual yang dinamis. Evaluasi terhadap asumsi-asumsi ini perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan keakuratan proyeksi pendapatan dan belanja daerah serta menghindari ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dengan realita ekonomi yang terjadi.

Kedua, partisipasi publik merupakan faktor penting dalam proses penyusunan APBD. Partisipasi yang baik dapat memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses ini melalui penyediaan informasi yang jelas dan terbuka serta mekanisme partisipasi yang inklusif.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD harus diperkuat. Transparansi yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran secara lebih efektif. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa informasi mengenai penggunaan anggaran disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Keempat, prosedur-prosedur yang digunakan dalam penyusunan APBD perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya. Penyempurnaan prosedur-prosedur ini dapat membantu meningkatkan kualitas anggaran dan memastikan bahwa APBD benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kelima, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat pemerintahan daerah dalam menyusun APBD juga menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah daerah perlu melakukan pelatihan dan pembinaan kepada aparatnya agar mampu menyusun anggaran dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Keenam, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan masyarakat perlu diperkuat dalam proses penyusunan APBD. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak dapat memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kepentingan dan aspirasi semua pihak yang terlibat.

Ketujuh, peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD juga diperlukan. Dengan memantau dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan APBD, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi perbaikan serta menghindari penyalahgunaan dan pemborosan anggaran.

Dengan demikian, tinjauan kritis terhadap asumsi dan prosedur dalam penyusunan APBD menghasilkan berbagai rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui langkah-langkah yang sistematis dan terarah, diharapkan APBD dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. (2017). Partisipasi Publik dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Studi Kasus di Kota Surakarta. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(2), 108-119.
- Handayani, N. P., & Widiyanto, B. (2012). Partisipasi Publik dalam Proses Penyusunan APBD Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 88-97.
- Indriyani, D. A., & Purnomo, B. S. (2010). Evaluasi Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 75-86.
- Kristiawan, A., & Putra, R. P. (2011). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penyusunan APBD Kota Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1(1), 45-54.
- Mardiasmo. (2019). *Perencanaan dan Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Prastowo, B. (2015). Kritis terhadap Asumsi Pertumbuhan Ekonomi dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Studi Kasus di Kabupaten Sleman. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 45-56.
- Santoso, T., & Widodo, S. (2013). Tinjauan Kritis terhadap Asumsi-asumsi Ekonomi dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 12-24.
- Suharto, E., & Cahyono, B. Y. (2016). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 10-20.
- Sulistiyowati, W., & Nugroho, R. D. (2018). Evaluasi Asumsi-asumsi Ekonomi dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(2), 82-92.
- Wibowo, S. A., & Kristanto, A. D. (2014). Analisis Prosedur Penyusunan APBD Kabupaten Sleman. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2(1), 30-41.